



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmat ALLAH Subhanahu Wata'ala, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD menyajikan Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Inovasi Daerah yang telah dikembangkan di Tahun Anggaran 2025. RLPPD akan disampaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media online, papan pengumuman yang mudah diakses oleh publik dan website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi. Begitupula segala bentuk masukan dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaihari, Maret 2026

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO



1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk per-Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

NO	KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	63.01.01	TAKISUNG	17.633	17.109	34.742
2	63.01.02	JORONG	18.999	18.123	37.122
3	63.01.03	PELAIHARI	42.348	41.879	84.227
4	63.01.04	KURAU	7.528	7.389	14.917
5	63.01.05	BATI BATI	24.263	23.332	47.595
6	63.01.06	PANYIPATAN	13.545	13.279	26.824
7	63.01.07	KINTAP	23.422	22.325	45.747
8	63.01.08	TAMBANG ULANG	9.976	9.635	19.611
9	63.01.09	BATU AMPAR	15.063	14.324	29.387
10	63.01.10	BAJUIN	10.552	10.124	20.676
11	63.01.11	BUMI MAKMUR	7.430	7.305	14.735
TOTAL			190.759	184.824	375.583

Sumber : Data DKB Semester II Tahun 2025

2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel berikut ini disampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas wilayah (km ²)
1	Panyipatan	Panyipatan	10	388,9009772
2	Takisung	Gunung Makmur	12	223,673557
3	Kurau	Padang Luas	11	68,700448
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	104,656396
5	Bati-Bati	Padang	14	234,24599
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	198,345405
7	Pelaihari	Pelaihari	20	364,030614
8	Bajuin	Bajuin	9	284,705522
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	419,05388
10	Jorong	Jorong	11	697,842345
11	Kintap	Kintapura	14	857,208419
Jumlah			135	3.841,372348

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) Tahun 2025



B. VISI-MISI KEPALA DAERAH

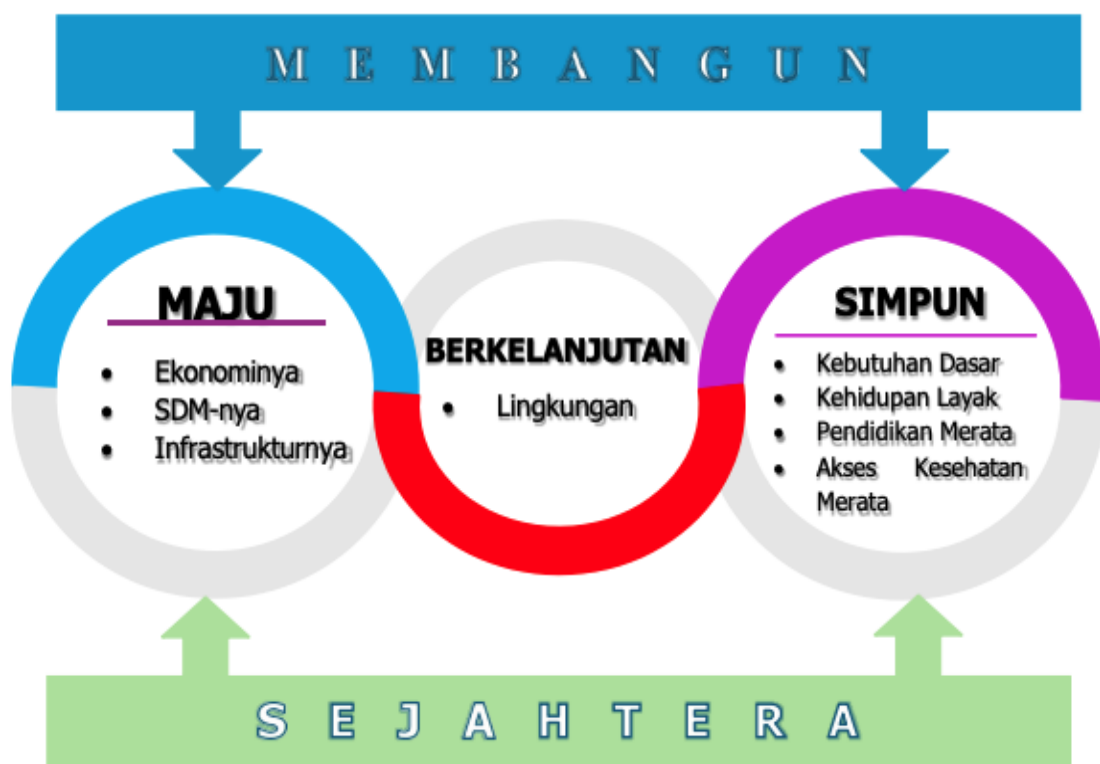
1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan “What do we want to become? (akan seperti apa kita di masa depan?)”. Hal tersebut mencerminkan cita-cita jangka panjang kepala daerah dalam membangun sebuah daerah, serta menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Tanah Laut kedepan. Value Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa value yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Value Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut



Note : SIMPUN berasal dari Bahasa Banjar yang memiliki arti “rapi atau tertata dengan baik atau bisa juga diartikan sebagai “selesai”



Makna dari visi pembangunan "Membangun" Tanah Laut SIMPUN, Maju, dan Berkelanjutan" tidak dapat terlepas dari kondisi Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya. Dari visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan berfokus kepada pembangunan yang merata dan optimal, baik itu ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat/SDM.

Dalam konteks visi pembangunan, kata "**Membangun**" tidak hanya berarti membangun secara fisik seperti Infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan fisik, seperti sekolah dan rumah sakit sangat penting sebagai fondasi bagi kemajuan suatu daerah atau negara. Namun, tanpa didukung oleh SDM yang unggul, pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi aspek yang tak terpisahkan, baik itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan karakter maupun peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM menjadi kunci bagi tercapainya visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Makna "Membangun" yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu saja ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dengan kondisi Kabupaten Tanah Laut saat ini yang masih belum optimal, maksud dari kata "Membangun" ini harus dimaknai sebagai peningkatan dan pengembangan potensi Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.

Makna "**Membangun Maju**" dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek membangun kemajuan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua aspek inilah yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan di Tanah Laut. Makna "Membangun Maju" secara implisit masuk di Misi pembangunan pertama "**Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama**". dan didukung pengembangan infrastruktur merata yang memperhatikan keberlanjutan melalui misi pembangunan kedua "**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**".

Sedangkan Makna "**Membangun SIMPUN**" ini merupakan gambaran kondisi Tanah Laut yang terpenuhi hak dasar masyarakat Tanah Laut untuk kehidupan layak dan memberikan kenyamanan dengan memperhatikan kualitas sosial serta kualitas budaya Tanah Laut. Kehidupan layak yang dimaksud harus berdasarkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama oleh masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap semua



pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, terutama dalam hal kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, "Membangun SIMPUN" berarti menciptakan pembangunan yang tertata dengan baik dan terselesaikan secara menyeluruh, di mana setiap warga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang terpenuhi, kehidupan yang layak, pendidikan yang merata bagi semua, serta layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Makna "Membangun SIMPUN" secara implisit masuk juga di Misi Pembangunan Pertama **"Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama"**.

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna membangun maju dan membangun simpun ini adalah pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Tanah Laut. Artinya, segala pembangunan, kebijakan, dan program yang akan dilakukan di Tanah Laut berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Cita-cita besar ini tidak terwujud dan bermakna jika nilai **"Sejahtera"** tidak menyertai proses pembangunan di Tanah Laut. Maka Makna dari sejahtera dapat diartikan pula sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Ini mencakup kesejahteraan ekonomi melalui peluang usaha dan pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata dan berkualitas, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Sejahtera juga berarti kehidupan sosial yang harmonis, pembangunan yang ramah lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya tercapai dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam

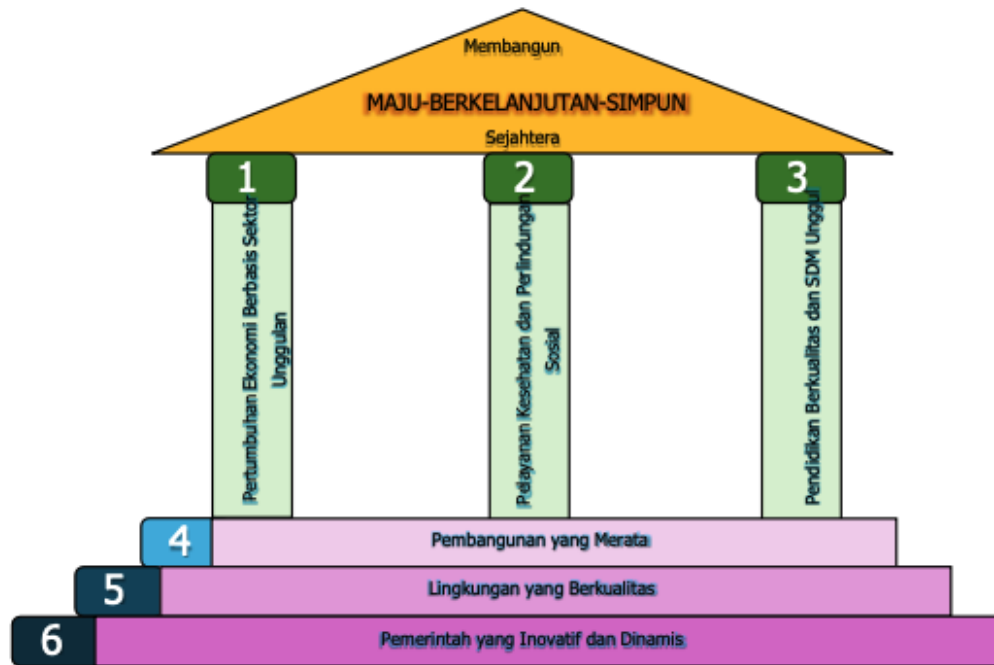
A. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada yang telah berlangsung, Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 6 Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan, keenam misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM.
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
5. enataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan.
6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah sebagai berikut.

Konstruksi Visi dan Misi Kepala Daerah



Dalam manajemen strategis, penyusunan arsitektur kinerja pembangunan memerlukan transformasi Misi Kepala Daerah menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan tanpa menghilangkan makna dan substansi dari misi yang diusung saat pilkada. Proses ini melibatkan ekstraksi makna dari setiap misi, kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang dan fungsi yang relevan. Dengan pendekatan ini, Misi Pembangunan dapat lebih terstruktur dan selaras dengan arah kebijakan serta program pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama.
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis

Misi Pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan kerangka berpikir pencapaian misi melalui cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka ini dirancang untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD sehingga memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



C. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,42	74,32	1,23
2	Angka Kemiskinan	3,74	3	-19,79
3	Angka Pengangguran	3,43	3,33	-2,92
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,01	5,14	2,59
5	Pendapatan Per-Kapita	58233,29	61.729,55	6,00
6	Ketimpangan Pendapatan	0,257	0,228	-11,28

Sumber Data : BPS Kabupaten Tanah Laut

D. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Permasalahan
A. Urusan Pendidikan								
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	11557	13141	87,9461228	%	Masih terdapat anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah, terlihat dari jumlah anak yang bersekolah sebanyak 11.557 orang dari total 13.141 anak usia 5–6 tahun
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	54787	59388	92,2526436	%	Masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum bersekolah, terlihat dari jumlah anak yang bersekolah sebanyak 54.787 orang dari total 59.388 anak usia 5–6 tahun
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	4270	4270	100	%	-



	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	496	1205	41,1618257	%	Masih terdapat toilet dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	819	2479	33,0375151	%	Masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan
B. Urusan Kesehatan								
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	3	4736	0,0633446	%	-
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi	24069	24121	99,7844202	%	-



	sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama						
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4173	4173	100	%	-
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	528	528	100	%	-



1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4672	4672	100	%	-
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	8960	8960	100	%	-
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1708	25831	6,6122101	%	-



<p>1.b.3</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</p>	<p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)</p>	<p>Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>4273</p>	<p>4736</p>	<p>90,2238176</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.b.4</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar</p>	<p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</p>	<p>Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>4723</p>	<p>4736</p>	<p>99,7255068</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.b.5</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar</p>	<p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun</p>	<p>Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>4650</p>	<p>4720</p>	<p>98,5169492</p>	<p>%</p>	<p>-</p>



<p>1.b.6</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar</p>	<p>Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3</p>	<p>Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>	<p>24126</p>	<p>26142</p>	<p>92,2882717</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.b.7</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar</p>	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p>	<p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama</p>	<p>53328</p>	<p>59334</p>	<p>89,8776418</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.b.8</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar</p>	<p>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif</p>	<p>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</p>	<p>156643</p>	<p>246927</p>	<p>63,4369672</p>	<p>%</p>	<p>-</p>



		sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun						
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	31141	37756	82,4796059	%	-
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2659	17503	15,1916814	%	-
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	12	12	100	%	tidak dimilikinya SDM yang berkategori/bersertifikasi penilik pada Tata Ruang sehingga tidak adanya data yang tepat untuk indikator ini



Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota								
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	605,53	1058,91	57,1842744	%	-
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	310938	375583	82,7880921	%	jumlah data penduduk terbaru diperoleh dari sumber data : Data Konsolidasi (DKB) Semester II tahun 2025



<p>1.c.4</p> <p>Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik</p>	<p>Jumlah rumah di kabupaten/kota</p>	<p>72485</p>	<p>86988</p>	<p>83,3275854</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.c.5</p> <p>Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir</p>	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)</p>	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)</p>	<p>402,86</p>	<p>2227,97</p>	<p>18,0819311</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>1.c.6</p> <p>Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman</p>	<p>Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman</p>	<p>Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob</p>	<p>102,299324</p>	<p>202,92</p>	<p>50,4136231</p>	<p>%</p>	<p>-</p>



	sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	kewenangan kabupaten/kota (Ha)					
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	207	207	100	%	tidak dimilikinya SDM yang berkategori/bersertifikasi penilik pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sehingga tidak adanya data yang tepat untuk indikator ini
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	9	9	100	%	-
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	476	1151	41,3553432	%	sistem perekrutan yang masih tradisional, serta keterbatasan akses pelatihan bagi pekerja



sertifikat pelatihan
operator dan
teknis/analisis

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	43	43	100	%	Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian di Bidang Perumahan Rakyat.
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	36,76	36,76	100	%	Untuk laporan Jumlah luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota di bawah 10 ha Kab/Kota itu ada 7 sektor yang mengampu kegiatan tersebut, dan berikut merupakan data dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	500	500	100	%	Untuk Persentase capaian Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di Tahun 2025 adalah 109% (545 Unit Rumah)
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	9	9	100	%	Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
E. Urusan Ketenteraman, Ketertian Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	2	3	66,6666667	%	Anggaran review Kajian Resiko Bencana (KRB) ada pada Tahun 2026



1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	59	59	100	%	Mengonsumsi minuman beralkohol, melanggar asusila, mendistribusikan gas LPG 3kg bersubsidi tidak sesuai dengan ketentuan
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	15	15	100	%	Permasalahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1039	1230	84,4715447	%	Masih ada warga negara/aparatur yang berada di daerah rawan bencana yang telah ditargetkan tidak menghadiri pelatihan yang telah diselenggarakan
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1138	1138	100	%	Kesulitan dalam mengumpulkan data BNBA terutama mengakses NIK dan No KK



1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	93	93	100	%	Pemasalahan yang terjadi dalam hal penanganan kebakaran/ non kebakaran yang terjadi di kabupaten tanah laut antara lain: 1. jumlah unit mobil damkar terbatas dan sebagian dalam kondisi rusak berat/ rusak sedang. 2. jumlah personil damkar di tanah laut terbatas masing-masing kecamatan hanya diisi oleh 2 -3 anggota dengan 1 unit mobil damkar 3. alat perlindungan diri sangat terbatas masih belum terpenuhi satu petugas satu APD baik APD kebakaran/ non Kebakaran dan penyelamatan 4. akses kelokasi kejadian baik kebakaran/ non kebakaran /penyelamatan cukup jauh dari posko damkar masing-masing kecamatan sehingga terkadang memerlukan waktu untuk sampai pada titik kejadian.
--------------	---	---	--	----	----	-----	---	--



F. Urusan Sosial									
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	475	475	100	%	-	
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	60	60	100	-	-	Kesulitan untuk menentukan data populasi karena bersifat insidental/tidak bisa diprediksi
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1475	1475	100	-	-	
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	10	10	100	-	-	



1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	19677	19677	100	-	Tidak bisa menentukan populasi korban bencana karena bersifat tidak bisa diprediksi sehingga jumlah korban bencana dijadikan sebagai populasi
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	2254	8490	26,548881	-	Tidak adanya Jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang bisa diberikan untuk fakir miskin sesuai dengan yang tercantum pada format data dukung



E. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dinilai melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai sumber informasi utama.

Untuk peringkat dan nilai hasil EPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut berada pada peringkat 86 dari 415 Kabupaten se-Nasional dengan skor 3,1013 berkategori Sedang.

2. Laporan Keuangan Pemerintahan daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penghargaan capaian kinerja keuangan yang baik ditandai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Tanah Laut selama 12 (dua belas) kali berturut-turut sejak tahun 2013-2024. Hal ini merupakan pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

F. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.557.604.360.295,78 atau 118,16% dari anggaran sebesar Rp.2.164.551.035.668,00 yang terbagi dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.247.831.489.081,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.269.256.411.275,78 atau 108,64% yang terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	95.186.876.858,00	99.943.398.282,00	105,00
2	Retribusi Daerah	20.263.353.045,00	20.863.509.844,00	102,96
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.096.587.238,00	135.164.831.209,78	113,49
Jumlah		247.831.489.081,00	269.256.411.275,78	108,64

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.1.828.344.394.508,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.161.226.101.821,00 atau 118,21% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.693.607.614.100,00	2.006.966.502.670,00	118,50
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,49
Jumlah		1.828.344.394.508,00	2.161.226.101.821,00	118,21

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari anggaran sebesar Rp.88.375.152.079,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.127.121.847.199,00 atau 143,84% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	97.956.735,00	1.268,85
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	143,75
Jumlah		88.375.152.079,00	127.121.847.199,00	143,84

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)



B. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.591.251.096.760,87 atau 90,51% dari anggaran sebesar Rp.2.862.912.928.226,68 yang terbagi dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi merupakan kelompok anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.1.892.979.540.884,78 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.701.275.875.078,87 atau 89,87% yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	901.247.806.312,68	820.319.374.066,00	91,02
2	Belanja Barang dan Jasa	855.705.907.082,95	754.254.946.068,46	88,14
3	Belanja Pemeliharaan	106.926.047.217,43	100.816.321.369,46	94,29
4	Belanja Subsidi	254.250.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	118.915.147.489,15	109.956.920.694,41	92,47
6	Belanja Bantuan Sosial	16.856.430.000,00	16.744.634.250,00	99,34
Jumlah		1.892.979.540.884,78	1.701.275.875.078,87	89,87

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.652.359.257.545,44 dapat direalisasikan sebesar Rp.602.824.425.067,00 atau 92,41% yang terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	2.305.412.500,00	5.113.400,00	0,22
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.188.488.821,50	120.525.457.622,00	89,15
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.656.644.021,45	173.359.266.138,00	89,52
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	317.512.198.902,49	307.599.272.657,00	96,88
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.279.273.500,00	165.303.300,00	7,25



6	Belanja Modal Aset Lainnya		1.417.239.800,00	1.170.011.950,00	82,56
Jumlah			652.359.257.545,44	602.824.425.067,00	92,41

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

3. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.17.469.737.235,46 dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00
Jumlah		17.469.737.235,46	0,00	0,00

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp.300.104.392.561,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.287.150.796.615,00 atau 95,68% yang terdiri dari Belanja Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	10.351.405.997,00	10.351.405.997,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	289.752.986.564,00	276.799.390.618,00	95,53
Jumlah		300.104.392.561,00	287.150.796.615,00	95,68

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

C. Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	805.725.660.105,52	805.725.660.105,52	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
Jumlah		815.725.660.105,52	815.725.660.105,52	100,00

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)



2. Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00

Sumber data: Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Unaudit)

G. INOVASI DAERAH

Peningkatan inovasi berkelanjutan merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pembaharuan layanan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Inovasi dikembangkan sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika regulasi, serta tuntutan peningkatan kinerja organisasi.

Pelaksanaan peningkatan inovasi berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi permasalahan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, serta pengembangan metode pelayanan yang lebih adaptif dan responsif. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan akses layanan, percepatan waktu pelayanan, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan inovasi secara berkelanjutan, pemerintah daerah berupaya membangun budaya kerja yang kreatif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun inovasi terkait pelayanan publik yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut)	Dinas Perhubungan
2	LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar)	
3	PELATARAN (Pelayanan Alat Penerangan Jalan)	
4	Rumah Singgah "AYANGJUKI"	Dinas Sosial
5	Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS)	
6	TRC (Tim Reaksi Cepat) Tim Yang Bergerak Secara Cepat Dan Tepat Untuk Memberikan Pelayanan Bantuan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Two In One (2 in 1), Three In one (3 in 1) dan Four In One (4 in 1).	
8	LASUNG (Layanan Sehari Tuntung)	



NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
9	LANJUNG (Layanan Kunjungan)	
10	LAKSA (Layanan Administrasi Kependudukan Setiap Ahad)	
11	SIKIJANG MAS (Sistem Pelayanan KIA melalui Jaringan Media Sosial)	
12	DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	
13	SIKECE (Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Kependudukan Secara Elektronik)	
14	SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	
15	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	
16	PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)	
17	SI CAPUNG (Sistem Informasi Cerai di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung)	
18	PELANGI (Pelayanan Terintegrasi)	
19	MANYASAH (Mambari Layanan ke Sekolah)	
20	BATATAI (Banikahan Tercapai, Administrasi Kependudukan Selesai)	
21	SILARIS (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terintegrasi dengan Desa)	
22	PILANDUK LANGKAR (Program Inovasi Sidang Diluar Gedung Pengadilan Dalam Rangka Layanan Kependudukan Kolaborasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Pelaihari)	
23	Sapa, Salam, Senyum dan Layani (SALAMI)	
24	Layanan Bina Marga On Call (BOC)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
25	RAZA LAKAS 112	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
26	BISA (Boejasin Information System and Applications)	RSUD Hadji Boejasin
27	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (SI PELANCONG)	Kecamatan Takisung
28	SITAJAM (Silaturahmi Satu Jam) Untuk Masyarakat Desa)	Kecamatan Jorong

H. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah selama tahun 2024. Dari laporan diatas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan mulai



dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2025 masih perlu untuk ditingkatkan agar tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dapat dicapai dan ditingkatkan.

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi bahan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam memberikan masukan yang konstruktif guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”**